

PERAN IRAN HUMAN RIGHTS (IHR) DALAM MENGGALANG DUKUNGAN UNTUK KASUS MAHSA AMINI

Oleh: Bunga Annisa Siregar

email: bungaannisasiregar@gmail.com

Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP., M.Int.Rel

Bibliografi: 16 Buku, 13 Artikel Jurnal, 41 Website, 1 Tesis, 7 Laporan

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

ABSTRACT

The death of an Iranian female activist, Mahsa Amini, after being arrested by Iran's moral police for not wearing the headscarf prompted demonstrations by the Iranian people in September in 2022. One of the non-governmental organizations that participated in raising aid for the death of Mahsa Amini is Iran Human Rights (IHR). IHR is a non-governmental organization based in Oslo, Norway that focuses on human rights in Iran.

This study uses the perspective of constructivism and the theory of non-governmental organizations by Lewis Kanji as a basic reference for the research to clarify the role of Iran Human Rights in gathering support for the death of Mahsa Amini. The analysis was conducted by examining books, official journal publications, documents, and news.

The results of the study show that to garner support for the case of Mahsa Amini's death, Iran Human Rights carries out an advocacy role, for example creating campaigns, publishing reports and statements, coordinating other human rights organizations, and encouraging diplomatic action. While the operational function plays a role in providing support to the Mahsa Amini family. Despite facing challenges in its implementation, ranging from limited access to information, an unfair justice system, to repression by human rights activists, IHR has proven that they are able to garner support and fight for human rights in Iran for the Amini case by relying on the cooperation of international human rights organizations, advocacy networks, the media, and individuals.

Keywords: Iran Human Rights, Mahsa Amini, Islamic Republic of Iran

PEMBAHASAN

Pada tanggal 13 September 2022, seorang wanita berkebangsaan Iran bernama Mahsa Amini ditangkap dan dianiaya karena dianggap berpakaian tidak pantas oleh polisi moral di Iran. Amini¹ merupakan gadis asal Saqaz, Provinsi Kurdistan di Iran.

Kematian Mahsa Amini setelah ditahan politik moral Iran mengakibatkan gelombang demonstrasi di Iran², para demonstrasi menuntut terhadap transparansi kematian Amini serta perlu pembongkaran terhadap polisi moralitas karena perlakuan terhadap mereka yang ditangkap Para aktivis yang tergabung dalam *Iran Human Rights* (IHR) menganggap Amini mengalami cedera serius hingga berujung kematian.

Kelompok aktivis terdepan yang mengkampanyekan kasus Amini adalah IHR. Iran merupakan anggota aktif dari organisasi IHR yang terdaftar di Norwegia. IHR menjadi organisasi terdepan dalam kasus Amini, dikarenakan pertama kali menggalang massa dalam kasus Amini. IHR gencar dalam melaporkan kejadian terkait Amini melalui media massa, media sosial serta dengan aksi demonstrasi.

Demonstran memprotes hak-hak dasar serta martabat mereka sebagai manusia.

Amini menjadi sumbu bara demonstrasi karena ia diduga ditangkap polisi moral karena tidak memakai hijab sesuai dengan standar peraturan pemerintah Iran. Isu perempuan di Iran kemudian semakin menjadi, tepatnya Jumat, 30 September 2022³. Saat itu pecah kerusuhan terjadi di tengah demonstrasi yang diprakarsai IHR di daerah perbatasan Iran-Pakistan. Ditambah lagi dengan penghapusan berbagai aturan yang melindungi kesetaraan, tentunya hal ini semakin menyebabkan ketimpangan antar-gender dan menjadikan Iran sebagai negara yang cenderung patriarkis.

IHR difokuskan pada penghapusan hukuman mati, supremasi hukum, mendukung pembela hak asasi manusia, memberdayakan masyarakat sipil dan mempromosikan semua hak asasi manusia untuk semua warga negara. Tujuan IHR adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang hukuman mati dan pelanggaran serius lainnya terhadap hak asasi manusia di Iran.

Dalam hal ini, Iran Human Rights menjadi salah satu organisasi yang memberikan dukungan dalam kasus Mahsa Amini tersebut. *Iran Human Rights* adalah organisasi non-partisan dan independen secara politik yang berbasis di Oslo,

¹ Ziryan Rojhelati. (7 Oktober 2022). The Demonstrations for Mahsa Amini: A Turning Point in Iran [Halaman Web]. Diakses melalui <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/demonstrations-mahsa-amini-turning-point-iran>.

² Totok Wijayanto. (27 September 2022). Dunia Bereaksi terhadap Tewasnya Mahsa Amini [Halaman Web]. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/foto/2022/09/27/dunia-bereaksi-terhadap-tewasnya-mahsa-amini>.

³ Kelly J. Shannon. (26 September 2022). Four Decades of Smoldering Discontent among Iranian Women is Erupting [Halaman Web]. Diakses dari <https://www.washingtonpost.com/made-my-history/2022/09/26/iranian-womenuprising-against-oppression-history/>.

Norwegia. IHR merupakan organisasi hak asasi manusia berbentuk NGO yang ada di luar Iran dan memiliki keanggotaan aktif serta pendukung di berbagai negara, seperti Iran, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan beberapa negara di Eropa. IHR gencar dalam mengkampanyekan setiap peristiwa yang berkaitan dengan kasus Amini dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan dari negara luar agar permasalahan HAM yang ada di Iran dapat terselesaikan. Sehingga, berdasarkan dari latar belakang tersebut dalam penelitian ini dapat dirumuskan pertanyaan, yaitu: Bagaimana peran *Iran Human Rights* terhadap penanganan kasus Mahsa Amini di Iran?

KERANGKA TEORI

Perspektif Konstruktivisme

Tujuan dari konstruktivisme adalah untuk meningkatkan konsep yang ada. Diyakini bahwa konsep-konsep sebelumnya liberalisme dan neoliberalisme, serta realisme dan neorealisme, tidak mampu menjelaskan fenomena berakhirnya Perang Dingin. Masalah dinamika perubahan internasional, sifat praktik kelembagaan, peran lembaga non-negara, dan masalah hak asasi manusia hanyalah beberapa pertanyaan menarik yang ingin dijawab oleh konstruktivisme dalam politik internasional.⁴ Pendekatan dengan teori konstruktivis berguna untuk mengetahui keadaan alamiah (*nature*) yang sebenarnya, seperti kekerasan, kelas, gender, isu rasial, dan lain sebagainya. Konstruktivisme

tidak hanya menjelaskan tetapi memahami sebuah fenomena.⁵

Teori Non-Governmental Organisation

Pada penelitian ini, penulis menggunakan kerangka acuan dari pendapat Lewis dan Kanji mengenai peranan NGO, antara lain:

- Berperan dalam fungsi operasional: NGO memiliki peranan dalam operasional, itu berarti NGO terkait dengan merancang dan melaksanakan program aksi konkret yang secara langsung menghasilkan perubahan kondisi orang atau lingkungan alam, misalnya pembangunan, bantuan pangan, perawatan Kesehatan, perlindungan bangunan bersejarah, perlindungan Kesehatan hewan, konservasi alam, dan lain-lain.
- Berperan dalam fungsi advokasi: NGO memiliki peranan dalam advokasi, itu berarti NGO bertujuan untuk mempengaruhi pendapat, kebijakan, dan praktik otoritas nasional dan internasional pemerintah, kelompok sosial, badan usaha, dan masyarakat umum. Walaupun mereka tidak bisa langsung berorientasi pada perubahan kondisi realitas, namun mereka dapat melakukan dengan cara mempengaruhi perantaranya.⁶

⁵ Kevin Hartigan. (1992). *Matching Humanitarian Norms with Cold, Hard Interest: The Making of Refugee Policies in Mexico and Honduras, 1980-89*. *International Organization*. Vol. 46, No. 3. Summer. Hal. 710.

⁶ David Lewis dan Nazneen Kanji. (2009). *Non-Governmental Organization and Development*. New York: Routledge.

⁴ *Ibid* hal.195-196

Tingkat Analisis Kelompok

Berdasarkan penjelasan perbedaan tingkat analisis yang dipaparkan oleh Joshua S. Goldstein, dalam penelitian ini peneliti menggunakan tingkat analisis domestik (*domestic-level analysis*). Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mengkaji peranan dari kelompok pembela HAM di Iran, yaitu *Iran Human Rights* sebagai salah satu organisasi *non-governmental* dalam memberikan dukungan atas kasus Mahsa Amini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang didapat dari data sekunder atau data yang diperoleh melalui dokumen yang telah diuji kebenarannya, seperti melalui studi pustaka, topik literatur, arsip di perpustakaan, artikel jurnal, laporan, dan sumber-sumber data lainnya.

PEMBAHASAN

Praktik HAM di Iran

Wilayat al-Faqih merupakan sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan *Wilayat al-Amr*, dan kepemimpinan agama. Sistem politik pemerintahan Iran didasarkan pada ajaran Syiah dalam Islam.

Pemerintahan dengan sistem *Wilayat al-Faqih* nyatanya tidak menjamin terpenuhinya hak dan keadilan rakyat. Ulama-ulama yang ada justru ulama yang tidak terbuka dengan pembaharuan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peran ulama yang

justru melakukan pemantauan sepihak dari konteks keagamaan, termasuk mengenai kehadiran dan peran perempuan. Hal tersebut menjadi awal dari adanya ketimpangan mengenai perempuan dan budaya patriarki yang tumbuh dan terbentuk dalam masyarakat. Kemudian hal tersebut diperkuat dengan kedudukan ulama sebagai aktor yang merumuskan kebijakan dan penentu kebijakan lahirnya di mana ulama laki-laki sangat mendominasi proses tersebut. Dari sinilah kebiasaan kebijakan dimulai, suatu kebijakan dapat menghargai keadilan jika dalam perumusannya mewakili suara-suara rakyat.⁷

Di Iran sendiri, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur sebagaimana yang tertulis di beberapa undang-undang yang mengatur HAM, antara lain Kontitusi Iran, Hukum Pidana Iran, Hukum Pidana Syariah Iran, dan Hukum Peradilan Iran. Pengaturan terhadap hak asasi manusia yang ada di Iran tersebut akan tetapi seringkali tidak sesuai pada saat diaplikasikan kepada masyarakat. Praktik Hak Asasi Manusia (HAM) di Iran hingga saat ini menjadi subjek perdebatan dan kontroversi.

Kebijakan Kontroversial terhadap Perempuan di Iran

Kebijakan-kebijakan yang telah dicoba diberlakukan oleh para ulama banyak yang bersifat koersif, intimidatif dan diskriminatif terhadap perempuan, dan bahkan dinilai selalu menguntungkan laki-laki. Di

⁷ Bambang Cipto. (2004). *Dinamika Politik Iran: Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatami* Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

antaranya seperti pemisahan di tempat publik berdasarkan jenis kelamin, kontrol seksualitas seperti pada legalisasi praktik nikah mut'ah, kewajiban berhijab bagi seluruh perempuan Iran tanpa pengecualian, hak asuh anak, perceraian, hingga negara yang mengizinkan praktik pernikahan anak.

Salah satu kebijakan pemerintah Iran yang beberapa tahun belakangan menyebabkan perdebatan hingga berujung kematian adalah peraturan mengenai penggunaan jilbab berdasarkan syariat Polisi Moral Iran.

Pasca revolusi Islam Iran pada tahun 1979, kebijakan wajib berhijab bagi perempuan Iran dibuat. Pada masa itu, perempuan Iran diwajibkan untuk menutupi sebagian besar tubuh mereka kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Berbanding terbalik dengan era sebelumnya yaitu rezim Pahlevi, pada masa itu bahkan perempuan Iran yang tidak berhijab dianggap sama seperti orang telanjang. Memasuki tahun 1983, Parlemen Iran menegaskan kepada perempuan Iran jika mereka tampil di muka umum tanpa hijab akan dihukum dengan 74 cambukan.

Berdasarkan hasil putusan peraturan negara Iran yang disahkan pada tahun 1983, pemerintah Iran memberlakukan syarat wajib berjilbab bagi seluruh perempuan yang menginjakkan kakinya di negara Iran.⁸ Pengaturan tersebut

menjelaskan, bahwa seluruh perempuan yang sedang berada di negara Iran, baik itu merupakan warga asing maupun warga asli Iran, baik itu warga beragama Muslim maupun bukan Muslim wajib untuk menggunakan jilbab. Selain itu, pengaturan dalam aturan yang disahkan pada tahun 1983 tersebut juga menjelaskan mengenai aturan berjilbab yang dimaksud, di mana perempuan diwajibkan untuk menutupi rambut mereka dengan jilbab panjang, mengenakan celana longgar di bawah mantel mereka, dan pakaian yang tidak ketat.⁹

Kematian Mahsa Amini oleh Polisi Moral Iran

Diketahui bahwa Mahsa Amini sebenarnya berasal dari Kota Saqqez di Provinsi Kurdistan Iran Barat dan merupakan etnis Kurdi, kelompok minoritas di Iran yang sebagian besar tinggal di bagian barat negara tersebut dan bukan berasal dari Teheran. Pada 13 September, Mahsa Amini telah melakukan perjalanan untuk mengunjungi keluarganya. Saat kejadian, Mahsa sedang bersama kakaknya Kiarash Amini di pintu masuk jalan. Mahsa Amini segera ditangkap oleh Polisi Moral dan disebutkan akan dibawa ke kelas pengarahannya. Akan tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi, karena Mahsa dilarikan ke Rumah Sakit Karsa, di mana setelah koma selama tiga hari,

⁸ Rahman Admardika. (28 September 2022). Aturan Berhijab di Iran, Warga Asing dan Non-Muslim Juga Wajib Kenakan Jilbab [Halaman Web]. Diakses dari [https://news.okezone.com/read/2022/09/28/18/2676890/aturan-berhijab-di-iran-warga-](https://news.okezone.com/read/2022/09/28/18/2676890/aturan-berhijab-di-iran-warga-asing-dan-non-muslim-juga-wajib-kenakan-jilbab)

[asing-dan-non-muslim-juga-wajib-kenakan-jilbab](https://news.okezone.com/read/2022/09/28/18/2676890/aturan-berhijab-di-iran-warga-asing-dan-non-muslim-juga-wajib-kenakan-jilbab).

⁹ Republika. (25 April 2022). Pemerintah Iran Kian Ketat Perkara Hijab [Halaman Web]. Diakses dari <https://www.republika.id/posts/40017/pemerintah-iran-kian-ketat-perkara-hijab>.

dia dinyatakan meninggal pada hari Jumat waktu setempat.¹⁰

Bergabungnya IHR dalam Demonstrasi Kasus Mahsa Amini

Kelompok aktivis terdepan yang mengkampanyekan kasus Amini adalah *Iran Human Rights* (IHR). Iran merupakan anggota aktif dari organisasi IHR yang terdaftar di Norwegia. Pada tanggal 16 September melalui artikel yang dirilis melalui situs resmi iranhumanrights.com, IHR membagikan berita tersebut kepada masyarakat dunia. Kampanye #WomenLifeFreedom atau 'Hak Kebebasan Perempuan' pun mulai digaungkan melalui aksi protes di jalanan.

Peran IHR berdasarkan Teori NGO

1. Fungsi Advokasi IHR pada Kasus Mahsa Amini
- Gerakan Kampanye oleh IHR

Pada kasus Mahsa Amini ini, *Iran Human Rights* melancarkan aksi protes yang disertai dengan kemarahan dari masyarakat Iran pada pertengahan September 2022 beberapa hari setelah kematian Mahsa Amini. Kampanye pertama yang saat itu disuarakan adalah 'Kampanye Hak Kebebasan Perempuan'.¹¹

¹⁰ Aditya Jawa Iswara. (23 September 2022). Kronologi Kematian Mahsa Amini Iran, Picu Seminggu Amarah Massa [Halaman Web]. Diakses melalui <https://www.kompas.com/global/read/2022/09/23/180200570/kronologi-kematian-mahsa-amini-iran-picu-seminggu-amarah-massa?page=all>.

¹¹ Tommy Patrio Sorongan. (26 September 2022). Ini Latar Belakang Chaos di Iran Akibat Kematian Mahsa Amini [Halaman

Menyusul kampanye mengenai Hak Perempuan, kampanye selanjutnya yang juga didukung oleh *Iran Human Rights* yaitu 'Kampanye Melepas Hijab' di mana semua perempuan di jalanan Iran berunjuk rasa dengan melepas hijab mereka atau memotong rambut mereka di depan umum sebagai aksi protes.¹²

- Mempublikasikan Laporan dan Pernyataan Kasus Mahsa Amini

Dalam peran ini, *Iran Human Rights* berperan dalam Menyusun laporan lengkap mengenai kasus Mahsa Amini, termasuk kronologi peristiwa, bukti-bukti yang ada, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Laporan ini dapat dipublikasikan dan disebarluaskan kepada organisasi hak asasi manusia internasional, pemerintah asing, dan media untuk mendapatkan perhatian dan dukungan lebih lanjut.

- Menghubungi dan Berkoordinasi dengan Organisasi HAM Lainnya

Iran Human Rights membangun empati dan simpati melalui media massa yang ditujukan kepada organisasi internasional terkhusus organisasi hak asasi manusia untuk memberikan dukungan dan ikut serta dalam mengkampanyekan suara atas kasus Mahsa Amini. Seperti *Iran Human*

Web]. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220926094213-4-374885/ini-latar-belakang-chaos-di-iran-akibat-kematian-mahsa-amini>.

¹² Jessie Yeung. (21 September 2022). Iranian Women Burn their Hijabs as Hundreds Protest Death of Mahsa Amini [Halaman Web]. Diakses melalui <https://edition.cnn.com/2022/09/21/middleeast/iran-mahsa-amini-death-widespread-protests-intl-hnk/index.html>.

Rights yang membangun koalisi bersama 40 organisasi Hak Asasi Manusia dunia lainnya di mana dalam koalisi tersebut bertujuan untuk mengumpulkan bukti atas tindakan represif otoritas Iran, Adapun koalisi ini termasuk *Iran Human Rights*, *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, *Center for Human Rights in Iran* (ICHRI), *Hengaw Organisation for Human Rights*, dan *Balochistan Human Rights Group*.¹³

- Mendorong Tindakan Diplomatik

Melalui pernyataannya pada media, Direktur *Iran Human Rights*, Mahmood Amity-Moghaddam mengatakan, “Risiko penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap pengunjuk rasa adalah hal serius dan penggunaan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa adalah kejahatan internasional,” serta “Dunia harus membela rakyat Iran yang menuntut hak-hak dasar mereka”.¹⁴ Melalui koalisi 40 organisasi HAM dunia, IHR menyampaikan terkhusus kepada negara-negara Barat melalui hubungan diplomatik untuk lebih dari sekedar menyampaikan pesan dukungan publik, yakni menjatuhkan

sanksi baru kepada pemerintahan Iran atas kasus Mahsa Amini.¹⁵

2. Fungsi Operasional IHR pada Kasus Mahsa Amini
 - Memberikan Bantuan Hukum dan Mendukung Keluarga Mahsa Amini

Iran Human Rights dalam hal ini berperan untuk menyediakan bantuan hukum kepada keluarga Mahsa Amini, baik dalam hal pengumpulan bukti, penyusunan laporan, atau mendampingi mereka dalam proses hukum. Sebagai organisasi non-pemerintahan IHR juga bisa memberikan dukungan emosional dan moral kepada keluarga Mahsa Amini dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Dalam hal ini Iran Human Rights kerap mengumpulkan bukti-bukti dan laporan terkait kronologi kasus Mahsa Amini yang sebenarnya dan mempublikasikannya melalui artikel di situs resmi *Iran Human Rights*.

Hasil Peranan IHR terhadap Kasus Mahsa Amini

1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Isu Hak Kebebasan Perempuan

Dari diterapkannya kampanye yang disinyalir dari berbagai pihak, salah satunya organisasi Iran Human Rights dalam kampanye “Hak Perempuan” dan kampanye “Melepas Hijab”, hal tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat, baik masyarakat Iran sendiri maupun masyarakat internasional tentang isu-isu hak asasi manusia yang relevan, Dengan menyebarkan informasi, mengedukasi, dan membangkitkan kesadaran publik, kampanye tersebut

¹³ Jemima Shalimar. (20 Oktober 2022). Tanding di Luar negeri Tanpa Hijab, Atlet Panjat Tebing Iran Disebut ‘Pahlawan’ [Halaman Web]. Diakses melalui <https://kumparan.com/kumparannews/tanding-di-luar-negeri-tanpa-hijab-atlet-panjat-tebing-iran-disebut-pahlawan-1z5L7xkTdFL/full>.

¹⁴ BBCNews. (18 September 2022). Aksi Protes di Iran Usai Tewasnya Mahsa Amini Menyebabkan Puluhan Orang Meninggal [Halaman Web]. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c984pggnnyo>.

¹⁵ Leyla Khodabakshi. Op.,Cit.

membantu mengubah pandangan dan sikap masyarakat terhadap isu-isu tersebut.

2. Dukungan Internasional melalui Sanksi

- Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada polisi moral Iran dan menyalahkan mereka atas kematian Mahsa Amini yang diduga tidak mengenakan jilbab secara benar.¹⁶ Amerika Serikat juga memasukkan tujuh pejabat senior ke daftar hitam, termasuk Kepala Divisi Kepolisian Teheran, Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi dan Haji Ahmad Mirzaeim.¹⁷
- Pada tanggal 22 Mei 2023 lalu, Uni Eropa kembali menyetujui pemberlakuan sanksi hukuman baru terhadap lima orang dan dua entitas yang terlibat dalam penindasan berdarah sejak Mahsa Amini meninggal dunia,¹⁸ setelah sebelumnya menjatuhkan sanksi terhadap 11 orang dan tiga organisasi selain polisi moral.¹⁹
- Pada bulan Desember 2022, Iran secara sah dikeluarkan dari Badan Perempuan PBB karena kebijakan-kebijakannya yang bertentangan dengan hak-hak perempuan dan anak perempuan.²⁰

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ BBCNews Indonesia. (06 November 2022). Aksi Protes di Iran: Lima Cara Hidup yang Berubah Setelah 50 Hari Demonstrasi Massal Anti-Pemerintahan [Halaman Web]. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-63509616>.

¹⁹ Leyla Khodabakhshi. Op., Cit.

²⁰ VOA. (15 Desember 2022). Iran Disingkirkan dari Badan Perempuan PBB setelah Kampanye AS. Diakses melalui

Sebagaimana yang sanksi yang diberlakukan oleh negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap Iran yang mencakup pada pembekuan aset, larangan dalam perdagangan, hingga perjalanan bagi pejabat pemerintah Iran. Sanksi-sanksi tersebut menyebabkan terisolasinya Iran dari hubungan internasional dan mempengaruhi reputasi pemerintahan Iran dalam internasional.²¹

3. Pembubaran Polisi Moral

Iran resmi membubarkan polisi moral setelah negara tersebut dilanda gelombang aksi protes dan kecaman dari dunia internasional selama lebih dari dua bulan yang dipicu kematian Mahsa Amini terkait aturan berpakaian bagi perempuan.²² Pembubaran polisi moral itu sebagaimana yang disampaikan oleh Jaksa Agung Iran, Mohammad Javar Montazeri pada bulan Desember 2022.²³

Tantangan IHR dalam Menggalang Bantuan Kasus Mahsa Amini

1. Keterbatasan Akses Informasi: Pemerintah Iran cenderung membatasi akses informasi dan

<https://www.voaindonesia.com/a/iran-disingkirkan-dari-badan-perempuan-pbb-setelah-kampanye-as/6876733.html>.

²¹ EEAS Europe EU. (2022). "European External Action Service" [Halaman Web]. Diakses melalui

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4141/eu-sanctions-iran_en.

²² Muhaimin. (05 Desember 2022). Resmi Dibubarkan, Tamat Sudah Polisi Moral Iran [Halaman Web]. Diakses melalui <https://international.sindonews.com/read/960239/43/resmi-dibubarkan-tamat-sudah-polisi-moral-iran-1670202764>.

²³ Ibid.

mengontrol aliran berita terkait kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.²⁴

2. Represi terhadap Aktivis Hak Asasi Manusia: Aktivis yang berani membela kasus seperti Mahsa Amini mungkin menghadapi risiko yang lebih besar, terbukti dari ditangkapnya lima pengacara yang membela kasus tersebut ditangkap.²⁵
3. Ketidakadilan Sistem Peradilan: Sistem peradilan di Iran sering kali dikritik karena tidak independen dan kurang adil. Hal ini dibuktikan dari banyaknya kasus kematian aktivis HAM yang diadili dan ditangkap sewenang-wenang, seperti penangkapan Elahe Mohammadi, reporten yang melipu pemakaman Amini.²⁶
4. Pembatasan Kebebasan Organisasi Masyarakat Sipil: Pemerintah Iran memberlakukan pembatasan yang ketat terhadap kegiatan organisasi masyarakat sipil, terutama yang terkait dengan hak asasi manusia.
5. Tantangan Diplomasi: Beberapa negara memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang rumit dengan

Iran, sehingga mereka enggan untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu contohnya yakni Amerika Serikat, di mana Partai Demokrat AS.

SIMPULAN

Kematian Mahsa Amini, seorang aktivis HAM dan jurnalis berasal dari suku Kurdi setelah ditangkap oleh Polisi Moral Iran yang diduga tidak menggunakan hijab berdasarkan aturan penggunaan hijab di Iran, menyebabkan aksi demonstrasi berkepanjangan, yakni dimulai saat pengumuman kematiannya pada tanggal 16 September 2022.

Salah satu organisasi yang ikut serta dalam menyuarakan keadilan bagi Mahsa Amini adalah *Iran Human Rights*. IHR sendiri merupakan organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh Mahmood Amiry-Moghaddam dan berbasis di Oslo, Norwegia. Sebagai organisasi non-pemerintahan, IHR difokuskan pada penghapusan hukuman mati, supremasi hukum, mendukung pembela hak asasi manusia, memberdayakan masyarakat sipil dan mempromosikan semua hak asasi manusia untuk semua warga negara.

Pada kasus kematian Mahsa Amini, dalam hal ini *Iran Human Rights* memiliki peranan penting dalam menggalang dukungan. Analisis peranan dilakukan dengan menggunakan teori *Non-Governmental Organization* dari pendapat Lewis dan Kanji, di mana NGO memiliki fungsi advokasi dan operasional. *Iran Human Rights*

²⁴ Jemima Shalimar. (20 Oktober 2022). Usai Blokir Internet selama Protes Kematian Amini, Iran Pidanakan Penjualan VPN [Halaman Web]. Diakses melalui <https://kumparan.com/kumparannews/usai-blokir-internet-selama-protes-kematian-amini-iran-pidanakan-penjualan-vpn-1z5EhTuknMq/full>.

²⁵ Center for Human Rights in Iran. Op.,Cit.

²⁶ CNN Indonesia. (30 September 2022). Artis sampai Atlet, Iran Bersumpah Babat Habis Pendukung Mahsa Amini [Halaman Web]. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220930112007-120-854618/artis-sampai-atlet-iran-bersumpah-babat-habis-pendukung-mahsa-amini>.

memiliki fungsi advokasi berarti memiliki peranan dalam menyuarakan pandangan melalui kampanye, mempublikasikan laporan pernyataan terkait kasus Mahsa Amini, menghubungi dan berkoordinasi dengan organisasi HAM lainnya, serta mendorong adanya tindakan diplomatik dari negara lain. Sedangkan *Iran Human Rights* memiliki fungsi operasional yakni memberikan dukungan terhadap keluarga Amini, seperti perlindungan hukum dan dorongan moril.

Meskipun dalam upaya menggalang bantuan atas kasus Amini menghadapi tantangan, seperti keterbatasan akses informasi, represi aktivis HAM, ketidakadilan sistem peradilan, hingga tantangan diplomatik, akan tetapi *Iran Human Right* tetap terus berupaya menggalang dukungan dan memperjuangan HAM di Iran terkhusus pada kasus Mahsa Amini dengan mengandalkan kerja sama organisasi HAM internasional, jaringan advokasi, media, dan individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Admardika, Rahman. (28 September 2022). Aturan Berhijab di Iran, Warga Asing dan Non-Muslim Juga Wajib Kenakan Jilbab [Halaman Web]. Diakses dari <https://news.okezone.com/read/2022/09/28/18/2676890/aturan-berhijab-di-iran-warga-asing-dan-non-muslim-juga-wajib-kenakan-jilbab>.
- BBCNews Indonesia. (06 November 2022). Aksi Protes di Iran: Lima Cara Hidup yang Berubah Setelah 50 Hari Demonstrasi Massal Anti-Pemerintahan [Halaman Web]. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-63509616>.
- BBCNews. (18 September 2022). Aksi Protes di Iran Usai Tewasnya Mahsa Amini Menyebabkan Puluhan Orang Meninggal [Halaman Web]. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c984pggnnnyo>.
- Center for Human Rights in Iran. Op.,Cit.
- Cipto. Bambang. (2004). *Dinamika Politik Iran: Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatami Cetakan 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- CNN Indonesia. (30 September 2022). Artis sampai Atlet, Iran Bersumpah Babat Habis Pendukung Mahsa Amini [Halaman Web]. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220930112007-120-854618/artis-sampai-atlet-iran-bersumpah-babat-habis-pendukung-mahsa-amini>.
- EEAS Europe EU. (2022). "European External Action Service" [Halaman Web]. Diakses melalui <https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4141/eu-sanctions-iran-en>.
- Hartigan, Kevin. (1992). *Matching Humanitarian Norms with Cold, Hard Interest: The Making of Refugee Policies in Mexico and Honduras, 1980-89*. *International Organization*. Vol. 46, No. 3. Summer. Hal. 710.

- Iswara, Aditya Jawa. (23 September 2022). Kronologi Kematian Mahsa Amini Iran, Picu Seminggu Amarah Massa [Halaman Web]. Diakses melalui <https://www.kompas.com/glob al/read/2022/09/23/180200570/kronologi-kematian-mahsa-amini-iran-picu-seminggu-amarah-massa?page=all>.
- Lewis, David dan Nazneen Kanji. (2009). *Non-Governmental Organization and Development*. New York: Routledge.
- Muhaimin. (05 Desember 2022). Resmi Dibubarkan, Tamat Sudah Polisi Moral Iran [Halaman Web]. Diakses melalui <https://international.sindonews.com/read/960239/43/resmi-dibubarkan-tamat-sudah-polisi-moral-iran-1670202764>.
- Republika. (25 April 2022). Pemerintah iran Kian Ketat Perkara Hijab [Halaman Web]. Diakses dari <https://www.republika.id/posts/40017/pemerintah-iran-kian-ketat-perkara-hijab>.
- Rojhelati, Ziryan. (7 Oktober 2022). The Demonstrations for Mahsa Amini: A Turning Point in Iran [Halaman Web]. Diakses melalui <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/demonstrations-mahsa-amini-turning-point-iran>.
- Shalimar, Jemima. (20 Oktober 2022). Tanding di Luar negeri Tanpa Hijab, Atlet Panjat Tebing Iran Disebut 'Pahlawan' [Halaman Web]. Diakses melalui <https://kumparan.com/kumparanews/tanding-di-luar-negeri-tanpa-hijab-atlet-panjat-tebing-iran-disebut-pahlawan-1z5L7xkTdFL/full>.
- Shalimar, Jemima. (20 Oktober 2022). Usai Blokir Internet selama Protes Kematian Amini, Iran Pidanakan Penjualan VPN [Halaman Web]. Diakses melalui <https://kumparan.com/kumparanews/usai-blokir-internet-selama-protes-kematian-amini-iran-pidanakan-penjualan-vpn-1z5EhTuknMq/full>.
- Shannon, Kelly J. (26 September 2022). Four Decades of Smoldering Discontent among Iranian Women is Erupting [Halaman Web]. Diakses dari <https://www.washingtonpost.com/made-my-history/2022/09/26/iranian-womenuprising-against-oppression-history/>.
- Sorongon, Tommy Patrio. (26 September 2022). Ini Latar Belakang Chaos di Iran Akibat Kematian Mahsa Amini [Halaman Web]. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220926094213-4-374885/ini-latar-belakang-chaos-di-iran-akibat-kematian-mahsa-amini>.
- VOA. (15 Desember 2022). Iran Disingkirkan dari Badan Perempuan PBB setelah Kampanye AS. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/iran-disingkirkan-dari-badan-perempuan-pbb-setelah-kampanye-as/6876733.html>.
- Wijayanto, Totok. (27 September 2022). Dunia Bereaksi

terhadap Tewasnya Mahsa
Amini [Halaman Web].
Diakses dari
<https://www.kompas.id/baca/fo-to/2022/09/27/dunia-bereaksi-terhadap-tewasnya-mahsa-amini>.

Yeung, Jessie. (21 September 2022).
Iranian Women Burn their
Hijabs as Hundreds Protest
Death of Mahsa Amini
[Halaman Web]. Diakses
melalui
<https://edition.cnn.com/2022/09/21/middleeast/iran-mahsa-amini-death-widespread-protests-intl-hnk/index.html>.